

# TESIS

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
KEGIATAN PENCETAKAN SAWAH BARU  
DI KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU**

**MARHANI  
PO108209514**



**PROGRAM STUDI SISTEM-SISTEM PERTANIAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
KEGIATAN PENCETAKAN SAWAH BARU  
DI KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU**

**MARHANI**  
PO.108209514

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

---

**Prof. Dr. Ir. A.Rahman Mappangaja, MS**

---

**Prof. Dr.Ir. Rahim Darma, MS**

Ketua Program Studi  
Pascasarjana Sistem-Sistem Pertanian

Direktur Program  
Universitas Hasanuddin

---

**Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si**

---

**Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARHANI  
Nomor Mahasiswa : P0108209514  
Program Studi : Sistem-Sistem Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2013  
Yang menyatakan,

MARHANI

## ABSTRAK

**MARHANI.** *Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu* (dibimbing oleh **A. Rahman Mappangaja** dan **Rahim Darma**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak sosial ekonomi kegiatan pencetakan sawah baru di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu Timur

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu Timur selama dua bulan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2012. Populasi penelitian adalah seluruh petani yang terlibat dalam kegiatan pencetakan sawah baru tahun 2010 di Kecamatan Bupon. Sampel yang diambil sebanyak 23 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui survey, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap alih fungsi lahan dari lahan kakao menjadi lahan sawah. Di samping itu, dampak yang terjadi pada kenaikan nilai ekonomi lahan, perubahan status petani, pola penggunaan waktu, dan pendapatan petani.



## ABSTRACT

**MARHANI.** *The Socio-Economic Impact of the Activities to Make New Wet Rice Fields in Bupon Sub district, Luwu Regency* (supervised by **A. Rahman Mappangaja** and **Rahim Darma**)

This research aims: (1) to provide the farmers with information about the activities of making the new wet rice fields; (2) to give the head of the Food Crops and Horticulture Service as well as the head of the Animal Husbandry Service the inputs which they can use as reference and study materials.

The research was conducted in Bupon Sub-District and used both the qualitative and quantitative approaches. The population included all farmers who were involved in making the new rice fields in 2010. They totaled 23 respondents.

The result of the research indicated that the activities to make new rice fields had brought impacts changes to the farmers. Among others were: the cocoa lands were changed to paddy fields, the land economic values had increased significantly, the status of the farmers had changed, the patterns of spending their time and earnings had also changed.



## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu, dengan ketulusan yang sangat mendalam, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

Bapak Prof.Dr.Ir.A.Rahman Mappangaja,MS dan Bapak Prof.Dr.Rahim Darma,MS selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat mulai dari awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.

Ibu Dr.A.Nixia Tenriawaru,SP,M.Si, Ibu Dr.Ir.Saadah,M.Si, Bapak Dr.Ir.Muhammad Nathan,M.Sc selaku penguji yang telah memberikan petunjuk, saran, dan masukan-masukan dalam penyempurnaan tesis ini.

Direktur Pascasarjana dan seluruh dosen Program Studi Sistem-Sistem Pertanian Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan keilmuan.

Staf administrasi umum dan akademik Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Muh. Yusuf, Baharuddin dan Herawati ) yang telah banyak membantu dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian administrasi yang dibutuhkan.

Seluruh responden penelitian yang bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi penting berkaitan dengan penelitian ini.

Nuri,SP selaku penyuluh lapangan yang banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

Akhirnya, tesis ini penulis persembahkan kepada orang yang sangat penulis cintai Ibunda Hasni Manca dan ayahanda Ali Sadidu, serta mertua Ayahanda Ansorul Tohar dan Ibunda Eman Beningsih atas curahan kasih sayang, doa, harapan dan pengorbanannya. Teristimewa kepada suami tercinta Eko Benianto, ST dan anak-anakku Muh. Airlangga dan Nabila Anggun Lestari yang senantiasa penuh kasih sayang memberikan dorongan, pengertian, motivasi dan semangat untuk

maju dan berhasil, saudara-saudaraku tercinta Semoga kehidupan kita senantiasa diberkahi dan selalu diridhoi oleh Allah SWT.

Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu Terkhusus Bidang Pengelolaan Lahan Air dan Perlindungan Tanaman Penulis Bersyukur berada di lingkungan kerja yang baik dan bekerjasama dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan.

Tidak lupa terima kasih pada teman-teman seangkatan pada Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian, Bapak Kasim Alwi, Suardi Mandung, Syahrir, Leimena, Ernida Mahmud, Asninda, Avriyani, Hajrah Lalla, Ninik, Indri, Ana, Irma, atas segala bantuan dan kebersamaannya.

Penulis menyadari sebagai makhluk ciptaan Al-Khalik senantiasa diliputi kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, segala urusan selayaknya disandarkan kepada-Nya dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, Amin.

Makassar, Juni 2013

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN TIM PENGUJI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAH KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Konversi Lahan .....	7
2.2. Dampak Konversi Lahan Secara Ekonomi, sosial dan ... Lingkungan	9
2.3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan.....	12
2.4. Nilai Tanah.....	18
2.5. Status Petani.....	21
2.6. Pola Kerja Petani.....	22
2.7. Produksi .....	25
2.8 Pendapatan.....	30
2.9. Usahatani Padi .....	26
2.10. Dinamika Sosial Ekonomi Petani Kakao .....	35

2.11. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru.....	35
2.12. Kerangka Pikir.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	56
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	57
3.3 Populasi dan Sampel .....	57
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	58
3.5 Analisa Data.....	58
3.6 Definisi Operasional.....	60
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
4.1 Profil Kecamatan Bua Ponrang .....	65
4.1.1 Keadaan Geografis.....	65
4.1.2 Pemerintahan .....	66
4.1.3 Pertanian dan Perkebunan .....	67
4.1.4 Demografi .....	70
4.1.5 Pendidikan .....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Karakteristik Petani Responden.....	73
5.1.1 Usia.....	73
5.1.2 Tingkat Pendidikan .....	75
5.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga.....	76
5.1.4 Pengalaman Berusahatani.....	78
5.2 Usaha Budidaya Padi Kegiatan Pencetakan Sawah Baru .....	79
5.2.1. Pengolahan Lahan .....	73
5.2.2 Persiapan Bibit.....	80
5.2.3 Penanaman .....	82

5.3 Karakteristik Lahan Yang Dicitak Menjadi Sawah Baru ...	86
5.3.1 Jenis Lahan yang Dicitak Menjadi Sawah Baru .....	69
5.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan.	88
5.3.3 Dampak Konversi Lahan Kakao Terhadap Kehilangan Produksi.....	92
5.3.4 Sumber Perolehan Lahan .....	93
5.3.5 Luas Lahan .....	95
5.3.6 Status Kepemilikan Lahan .....	96
5.3.7 Pola Penggunaan Waktu .....	98
5.3.8 Nilai Lahan.....	101
5.3.9 Sumber Dana .....	103
5.4.0 Pendapatan .....	104
5.4.1 Dampak Sosial.....	107
5.4.2 Implikasi Kebijakan .....	109
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>110</b>
6.1 Kesimpulan .....	110
6.2 Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
1.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Agama, Pekerjaan, Pengalaman Berusahatani, Luas Lahan dan Jumlah Tanggungan Keluarga di Kecamatan Bupon, 2010.....	92
2.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Jenis Lahan, yang Di Cetak Menjadi Sawah Baru di Kecamatan Bupon , 2010.....	93
3.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bupon , 2010 .....	94
4	Identitas Petani Responden Berdasarkan Sumber Lahan yang Di Cetak di Kecamatan Bupon , 2010.....	95
5.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Sumber Lahan yang Di Cetak di Kecamatan Bupon , 2010.....	96
6	Identitas Petani Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan yang Di Cetak di Kecamatan Bupon , 2010.....	97
7	Kuisisioner Penelitian Dampak Kegiatan Pencetakan Sawah Baru Kecamatan Bupon , .....	98

---

## DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Hal</i>
1.	Gambar Kerangka Pikir Dampak Pencetakan Sawah Baru Kecamatan Bupon Kecamatan Bupon, 2010.....	41
2.	Gambar Lokasi Calon Pencetakan Sawah Baru Kecamatan Bupon Kecamatan Bupon, 2010.....	99
3.	Gambar Lokasi Lahan Pencetakan Sawah Baru yang Sedang Digusur di Kecamatan Bupon Kecamatan Bupon, 2010.....	100
4.	Gambar Lokasi Lahan Pencetakan Sawah Baru yang Sedang Pengolahan Lahan di Kecamatan Bupon Kecamatan Bupon, 2010.....	103

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
1.	Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Yang Di Cetak Menjadi Sawah Baru di Kabupaten Luwu.....	4
2.	Data Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering Dirinci Per Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bua Ponrang Tahun 2010.....	68
3.	Data Luas Lahan Produksi dan Jumlah Petani Menurut Jenis Tanaman Perkebunan Rakyat Kecamatan Bua Ponrang Tahun 2010.....	69
4.	Data Jumlah Penduduk Ditinjau Dari Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bua Ponrang Tahun 2010.....	71
5.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Kisaran Usia Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	74
6.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	75
7.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	76
8.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	78
9.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Karakteristik Lahan Yang Dicitak Menjadi Sawah Baru Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	86
10.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	88

---

11.	Data Luas Lahan Kakao Yang Tidak Produktif dan Lahan Kakao Yang Telah Dicitak Menjadi Sawah Baru Di Kecamatan Bupon Tahun 2012	91
12.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Sumber Perolehan Lahan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	94
13.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Luas Lahan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Bupon Tahun 2010.....	96
14.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	97
15.	Pola Kerja Petani Sebelum dan Setelah Pencetakan Sawah Baru pada Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	99
16.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Nilai Lahan Sebelum Dikonversi dan Setelah Dikonversi Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	102
17.	Identitas Petani Responden Berdasarkan Sumber Dana pada Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Tahun 2010.....	103
18.	Analisis Pendapatan Petani Padi Rata-Rata Per Hektar Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu Tahun 2010.....	106

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Dari sisi produksi, peningkatan ketahanan pangan tersebut diupayakan melalui peningkatan produksi beras terutama yang dihasilkan dari lahan sawah. Pertimbangan yang melatar belakangi kebijakan tersebut adalah bahwa beras merupakan bahan pangan pokok penduduk yang memiliki sumbangan paling besar terhadap konsumsi kalori dan protein yaitu sekitar 55 persen dan 45 persen ( SUSENAS, 1999). Pola konsumsi pangan demikian menyebabkan kelangkaan beras akan sangat mempengaruhi kecukupan konsumsi gizi penduduk. Selain itu, produktivitas usahatani padi lahan kering, dimana sekitar 90 persen produksi beras nasional dihasilkan dari usahatani padi sawah ( Irawan et al., 2003). Kondisi demikian menyebabkan pemberdayaan lahan sawah untuk menghasilkan padi akan memberikan dampak lebih besar terhadap ketersediaan pangan dibanding pemberdayaan lahan kering.

Akibat pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita yang dirangsang oleh kenaikan pendapatan rumah tangga, maka kebutuhan beras terus mengalami peningkatan. Untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, produksi beras nasional harus meningkat secara memadai dalam rangka mempertahankan kecukupan pangan. Namun berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan

produksi beras akhir-akhir ini justru semakin lambat. Perlambatan laju pertumbuhan produksi beras tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya laju pertumbuhan produktivitas usahatani padi akibat tidak adanya terobosan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi secara signifikan. Padahal pengalaman selama ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas padi tersebut merupakan faktor utama bagi peningkatan produksi beras nasional.

Pada kondisi dimana produktivitas usahatani padi semakin sulit ditingkatkan, peningkatan luas panen padi merupakan upaya yang terpaksa dilakukan untuk meningkatkan produksi padi nasional. Peningkatan luas panen padi tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan luas sawah melalui program pencetakan sawah baru. Akhir-akhir ini luas lahan sawah justru cenderung berkurang akibat dikonversi ke penggunaan nonpertanian.

Namun tidak semua juga petani langsung mengalihfungsikan lahannya dari pertanian ke nonpertanian. Pengalihfungsian lahan yang dilakukan oleh petani yaitu dengan melihat kondisi tanaman yang tidak mampu berproduksi dengan baik sehingga petani mengambil keputusan untuk mengganti tanaman tersebut dengan tanaman lain

Kabupaten Luwu merupakan daerah agraris, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian usaha persawahan. Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani tersebut telah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk menuju swasembada pangan.

Kabupaten Luwu juga merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Propinsi Sulawesi Selatan.

Meski demikian tantangan untuk mencapai swasembada pangan tersebut sangat besar, terutama Karen faktor luas lahan pertanian yang semakin tahun semakin sempit karena bertambahnya penduduk setiap tahun dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian (industry, pemukiman, perluasan kota, dsb ). Disamping itu setelah pemekaran Kabupaten Luwu yang menjadikan Kota Palopo sebagai Kota Otonom, otomatis luas lahan sawah dan lahan kering akan semakin berkurang, terlebih lagi setelah pemerintah pusat menetapkan Kota Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2005, sehingga semua aktivitas dan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Luwu di pusatkan di Kota Belopa, yang sebelumnya sudah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya yang kesemuanya ini sebagian besar menggunakan lahan lahan produktif milik petani

Dengan melihat data yang ada, luas lahan sawah di Kabupaten Luwu 36.569 Ha. Sementara luas lahan yang tidak diusahakan tapi potensial untuk dijadikan lahan sawah selua 10.885 Ha.

Tabel 1. Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Yang Di cetak Menjadi Sawah Baru Di Kabupaten Luwu

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Yang Dicetak Menjadi Sawah Baru ( Ha)	Total (Ha)
1	2008	36.277	200	36.477
2	2009	36.376	200	36.576
3	2010	36.346	250	36.596
4	2011	37.536	600	38.136
5	2012	38.136	1.500	39.636
	Jumlah	183.671	2.750	186.421

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu, 2012

Data yang ditunjukkan pada Tabel 1 menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 telah terjadi pencetakan sawah baru seluas 2.750 Ha. Kegiatan Pencetakan sawah baru ini terjadi pada beberapa kecamatan yang memang masih memiliki potensi lahan pertanian untuk dicetak menjadi sawah baru

Program Pencetakan Sawah Baru yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu adalah salah satu program pemerintah pusat dan daerah dengan harapan bahwa setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh kelompok tani maka secara bertahap masalah berkurangnya lahan

pertanian akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian dapat diatasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap alih fungsi lahan
2. Bagaimana Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap nilai lahan
3. Bagaimana Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap status petani
4. Bagaimana Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap pendapatan
5. Bagaimana Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap pola penggunaan waktu

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis dampak pencetakan sawah baru terhadap alih fungsi lahan, nilai lahan, status petani, pola penggunaan waktu dan pendapatan.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi petani tentang kegiatan pencetakan sawah baru
2. Sebagai bahan masukan kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu sebagai penanggung jawab kegiatan
3. Sebagai bahan referensi dan studi bagi pihak yang membutuhkan

## **BAB II.**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konversi Lahan**

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative ( masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh factor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Alih fungsi lahan yang umumnya terjadi adalah alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian. Menurut Suwandi (2002), lahan pertanian yang memiliki fungsi utama untuk bercocok tanam padi, palawija, atau hortikultura dikarenakan gencarnya industrialisasi berakibat pada beralihnya fungsi lahan-lahan produktif pertanian menjadi pabrik-pabrik, jalan tol, permukiman, perkantoran, dan lain sebagainya.

Semakin bertambahnya penduduk perkotaan akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi, kota semakin memerlukan fasilitas-fasilitas pendukung terutama perumahan. Pembangunan perumahan selalu memerlukan lahan

yang sudah ada, sehingga merubah penggunaan lahan dari non perumahan ke perumahan/pemukiman dan sarana jalan (Anonim, 2011).

Gany dan Ala (2011) mengemukakan bahwa lahan-lahan persawahan di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi kawasan permukiman, industry perkantoran, dan bahkan untuk infrastruktur berjalan tanpa hambatan. Kebijakan perlindungan terhadap pertanian belum efektif sehingga tidak sedikit petani padi sawah yang lebih tergiur memilih lahan sawahnya yang sudah terbatas dijual dengan harga yang lebih tinggi karena tekanan kebutuhan sesaat.

Secara teoritis, alih fungsi lahan sawah dapat menimbulkan kerugian, terutama hilangnya lahan produktif penghasil beras, disamping tidak menampik adanya manfaat ekonomi. Namun demikian, tidaklah mudah untuk membuat kalkulasi pasti dari manfaat dan kerugian akibat konversi ini, karena cukup banyak manfaat dan kerugian yang sulit diukur.

Dampak negative konversi lahan berdasarkan hasil penelitian adalah hilangnya"peluang" memproduksi hasil pertanian di lahan sawah yang terkonversi, diantaranya hilangnya produksi pertanian dan nilainya, pendapatan usaha tani, dan kesempatan kerja pada usahatani. Konversi juga mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan dan kesempatan kerja pada kegiatan ekonomi yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usahatani tersebut, misalnya usaha traktor dan penggilingan padi. Kerugian yang terjadi secara tidak langsung adalah

meningkatkan pencemaran, banjir, jumlah petani berlahan sempit dan tingkat kriminilitas (Anonim, 2011).

Terkait dengan dampaknya terhadap kesempatan kerja di bidang pertanian, hal yang sama juga dikemukakan Gany dan Ala (2011) bahwa konversi lahan pertanian berakibat pada beralihnya pekerjaan petani penyakap dan penggarap ke sektor-sektor informal sebagai sumber penghidupan. Derasnya arus konversi lahan persawahan karena kebanyakan pemilik lahan adalah golongan petani luas yang tidak pernah memperhitungkan betapa susahya petani-petani penggarap dan penyakap yang harus kehilangan garapan dan sumber penghidupan satu-satunya apabila lahan tersebut beralih fungsi. Namun tidak semua juga petani langsung mengalihfungsikan lahannya dari pertanian ke nonpertanian. Pengalihfungsian lahan yang dilakukan oleh petani yaitu dengan melihat kondisi tanaman yang tidak mampu memproduksi dengan baik sehingga petani mengambil keputusan untuk mengganti tanaman tersebut dengan tanaman lain

## **2.2. Dampak Konversi Lahan Secara Ekonomi, Sosial**

### **Dan Lingkungan**

Sumberdaya lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomis, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke penggunaan non pertanian akan menimbulkan dampak negative terhadap berbagai aspek pembangunan.

Secara garis besar manfaat lahan pertanian dapat dibagi atas 2 kategori yaitu : pertama, use values atau nilai penggunaan yang dapat pula disebut sebagai personal use values. Manfaat ini dihasilkan dari kegiatan eksploitasi atau kegiatan usahatani yang dilakukan pada sumberdaya lahan pertanian. Kedua, non-use values yang dapat pula disebut sebagai intrinsic values atau manfaat bawaan. Yang termasuk kategori manfaat ini adalah berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik lahan. Salah satu contohnya adalah terpeliharanya keragaman biologis atau keberadaan spesies tertentu yang pada saat ini belum diketahui manfaatnya, tetapi di masa yang akan datang mungkin akan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kategori manfaat pertama (use values) lebih lanjut dapat dibedakan pula atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan pencetakan sawah baru dapat berupa 2 jenis manfaat yaitu :

1. Berupa output yang dipasarkan atau marketed output, yaitu berbagai jenis barang yang nilainya dapat terukur secara empirik dan diekspresikan dalam harga output. Yang termasuk kedalam jenis manfaat ini adalah berbagai produk pertanian yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi termasuk daun, dan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai biomass. Jenis manfaat ini bersifat individual, dalam pengertian

manfaat yang diperoleh secara legal hanya dapat dinikmati oleh pemilik lahan.

2. Berupa manfaat yang nilainya tidak terukur secara empirik atau harganya atau harganya tidak dapat ditentukan secara eksplisit (unprinces benefit). Jenis manfaat ini tidak dapat dinikmati oleh pemilik lahan tetapi dapat pula dinikmati oleh masyarakat luas atau bersifat komunal. Contohnya adalah tersedianya bahan pangan, sarana rekreasi, wahana bagi berkembangnya tradisi dan budaya pedesaan, dan tersedianya lapangan kerja di pedesaan yang selanjutnya dapat mencegah terjadinya urbanisasi yang seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial di daerah perkotaan.

Manfaat tidak langsung dari keberadaan lahan pertanian umumnya lebih terkait dengan aspek lingkungan. Yoshida (1994) dan Sogo Kenkyu (1998) mengungkapkan bahwa keberadaan lahan pertanian dari aspek lingkungan dapat memberikan lima jenis manfaat yaitu : mencegah terjadinya banjir, sebagai pengendali keseimbangan tata air, mencegah terjadinya erosi, mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, dan mencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan.

Hasil penelitian Agus et al (2004) mengungkapkan bahwa seluruh manfaat tersebut diatas yang diciptakan oleh lahan sawah di wilayah DAS Citarum bernilai sekitar 17,38 juta rupiah per hektar per tahun. Sedangkan untuk kasus DAS Brantas Irawan et al. (2002) mengungkapkan bahwa total

nilai manfaat lahan sawah tersebut sekitar 37,51 juta rupiah per hektar per tahun. Lebih dari 60 persen dari total nilai manfaat tersebut bukan merupakan marketed output atau manfaat yang bersifat individual. Artinya, sebagian besar manfaat yang diciptakan oleh lahan sawah merupakan jenis manfaat yang dinikmati oleh masyarakat luas atau yang bersifat komunal, jika lahan sawah dikonversi ke penggunaan non pertanian, maka dampak negative atau kerugian yang ditimbulkan lebih dirasakan oleh masyarakat luas daripada sebagian kecil masyarakat pemilik lahan.

### **2.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan**

Menurut Nasoetion dan Winoto (1996) proses alih fungsi lahan secara langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (i) sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah, dan (ii) sistem non-kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah antara lain direpresentasikan dalam bentuk terbitnya beberapa peraturan mengenai alih fungsi lahan.

Menurut Winoto (1995) dalam Nasoetion dan Winoto (1996), alih fungsi lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem pertanian yang ada seperti halnya perubahan di dalam land tenure system dan perubahan dalam sistem ekonomi pertanian. Faktor luar sistem pertanian seperti industrialisasi, perkotaan dan demografis,

Faktor-faktor yang menentukan alih fungsi lahan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial.

**a. Faktor Ekonomi**

Secara ekonomi alih fungsi lahan yang dilakukan petani baik melalui transaksi penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usahatani yang lain merupakan keputusan yang rasional. Sebab dengan keputusan tersebut petani berekspektasi terhadap pendapatan totalnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan meningkat.

Menurut Syafa'at et al. (2001), factor ekonomi yang menentukan alih fungsi lahan ke pertanian dan non pertanian adalah : (1) nilai kompetitif terhadap komoditas pertanian menurun; (2) respon petani terhadap dinamika pasar, lingkungan, dan daya saing usahatani meningkat.

Lahan bersifat langka sehingga harus dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Makin bertumbuhnya penduduk di Indonesia sehingga kebutuhan akan lahan pun meningkat. Lahan memiliki peranan penting dan semua aktivitas ekonomi membutuhkan lahan, walaupun dengan derajat kebutuhan dari segi luas secara relative berbeda. Dari berbagai jenis lahan yang menyebar secara spasial dengan kualitas yang beragam perlu dialokasikan secara optimal dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional dengan sasaran memberikan manfaat yang maksimal khususnya bagi petani di pedesaan.

Pemanfaatan lahan dengan sasaran pengembangan pendapatan petani dan ekonomi wilayah perlu difasilitasi dengan sejumlah alternative

teknologi introduksi pengembangan komoditas prioritas. Perencana pembangunan pertanian atau petani akan mempertimbangkan sejumlah aktivitas usahatani dalam upaya maksimisasi pendapatan. Pengembangan teknologi spesifik lokasi komoditas prioritas/unggulan daerah akan memberikan sejumlah opsi dengan kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan yang lebih besar. Teknologi introduksi yang ditawarkan dapat berupa paket teknologi untuk komoditas unggulan atau rakitan/sintesa teknologi dalam pola tanam dalam setahun. Fasilitas lain yang diperlukan adalah dukungan permodalan, mobilitas tenaga kerja, kelancaran arus barang dan perdagangan input-otput serta kebutuhan konsumsi lainnya.

Tanah merupakan barang ekonomi atau factor produksi. Sebagai factor produksi, tanah merupakan pabrik hasil-hasil pertanian. Sehubungan dengan itu semua pihak (petani, investor, dan pemerintah) mempunyai kepentingan yang sama. Para petani melihat bahwa tanah merupakan modal utama untuk memproduksi hasil-hasil pertanian yang menopang hidup mereka. Dalam rangka industry, para investor membutuhkan tanah untuk mendirikan pabrik. Berdirinya pabrik berarti menguarangi luas tanah pertanian. Pemerintah memandang bahwa tanah itu kekayaan Negara yang mendatangkan paja (penghasilan) (Wiangun, 2008)

#### **b. Faktor Sosial**

Menurut Witjaksono (1996) ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih

fungsi lahan, yaitu: perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dua faktor terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan. Dengan asumsi pemerintah sebagai pengayom dan abdi masyarakat, seharusnya dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan.

#### 1. Perubahan Pola Pikir

Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia baru di luar lingkungannya yang berimplikasi terhadap pola penggunaan peralatan tradisional. Kebutuhan akan sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan oleh petani tentunya dalam melihat situasi saat ini yang zaman teknologi. Mereka merasa dirinya sebagai petani ketinggalan zaman dan sama sekali belum modern. Persepsi mereka, terutama generasi mudanya, terhadap profesi petani tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan, yaitu bahwa profesi petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang bergengsi. Oleh karena itu, banyak anak-anak muda yang tidak mau bekerja sebagai petani.

Akibat perubahan cara pandang tersebut, citra petani dibenak mereka semakin menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan asset social semata, tetapi lebih diandalkan sebagai asset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi di luar bidang pertanian. Mereka tidak akan keberatan melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan

pada penggunaan non pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin kecil. Tidak sedikit petani menjual lahannya untuk biaya masuk kerja pada lapangan kerja formal, atau membeli kendaraan untuk angkutan umum.

## 2. Hubungan Pemilik dengan Lahan

Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada usahatani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya. Mereka tidak berani menanggung resiko atas ketidakpastian penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Begitu besar arti lahan bagi petani baik yang mempunyai lahan sempit maupun lahan yang luas. Disamping itu, status social penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas kepemilikan lahannya.

Dengan memiliki lahan yang luas, petani dapat memberi pekerjaan kepada tetangganya. Hubungan antara pemilik lahan dengan buruhnya diikat dalam ikatan kekeluargaan yang saling membutuhkan, meskipun dalam status yang berbeda. Dalam hal ini, lahan pertanian merupakan asset social bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai nilai instrument untuk mempertahankan kehormatan keluarganya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti ini tidak mudah tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang meskipun jumlahnya memadai.

### 3. Pemecahan Lahan

Sistim waris dapat meyebabkan kepemilikan lahan yang semakin menyempit. Oleh karena itu, lahan pertanian yang sempit di samping pengelolaanya kurang efisien juga karena hanya memberikan sedikit kontribusi atau penghasilan dari segi produksi bagi pendapatan keluarga petani pemiliknya. Biasanya petani tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang pertanian, sehingga mereka beralih mencari sumber pendapatan baru di bidang non pertanian. Untuk itu mereka membutuhkan modal atau dana yang diperoleh dengan cara menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang diwariskan petani kepada anaknya digunakan untuk pemukiman sebagai akibat pengembangan keluarga melalui perkawinan.

Bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan adalah lembaga perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat petani di pedesaan. Terbentuknya keluarga baru biasanya dibekali sebidang lahan oleh masing-masing pihak orang tua suami dan isteri untuk digabungkan menjadi milik bersama. Lahan inilah yang akan menjadi penopang hidup suami isteri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, permasalahannya letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah, sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya dan sulit mengendalikannya. Dua kondisi ini mendorong pemiliknya untuk menjual sebagian lahan tersebut

## **2.4. Nilai Tanah**

Nilai tanah mempunyai definisi atau pengertian bermacam-macam tergantung pada konteks dan tujuannya serta sudut pandangnya. Nilai tanah secara definisi diartikan sebagai kekuatan nilai dari tanah untuk dipertukarkan dengan barang lain. Sebagai contoh tanah yang mempunyai produktivitas rendah seperti tanah padang rumput relative lebih rendah nilainya karena keterbatasan dalam penggunaannya. Sedangkan nilai pasar tanah didefinisikan sebagai harga ( yang diukur dalam satuan uang) yang dikehendaki oleh penjual dan pembeli ( Shenkel 1988:31).

Nilai atas sebidang tanah dicerminkan oleh aliran aliran keuntungan yang diterima atas pemakaian sebidang tanah tersebut. Keuntungan-keuntungan tersebut berkaitan dengan pengaruh lingkungan yang dapat dibedakan sebagai faktor manusia dan non manusia. Faktor manusia berkenaan dengan perbuatan manusia untuk memperoleh nilai tanah seperti mendirikan bangunan.

Faktor non-manusia berkenaan dengan eksternalitas yang diterima oleh tanah tersebut. Jika eksternalitas bersifat positif, seperti banjir, kepadatan penduduk, dan adanya sarana jalan, maka tanah akan bernilai tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas, meskipun luas dan bentuk tanah itu sama, jika tanah menerima eksternalitas yang bersifat negative, seperti dekat dekat dengan sampah, jauh dari pusat kota/perekonomian, tidak bebas banjir, maka tanah akan bernilai rendah jika

dibandingkan dengan tanah yang tidak menerima eksternalitas yang negative ( Pearce and Turner 1990:78)

Nilai tanah dalam konteks pasar property adalah nilai pasar wajar yaitu nilai yang ditentukan atau ditetapkan oleh pembeli yang ingin membeli sesuatu dan penjual ingin menjual sesuatu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam kondisi wajar tanpa ada tekanan dari pihak luar pada proses transaksi jual beli sehingga terjadi kemufakatan. Pembeli dan penjual mempunyai tenggang waktu yang cukup atas property yang diperjualbelikan dan bertindak untuk kepentingan sendiri.

Nilai pasar pada dasarnya mencerminkan harga yang terbaik atas suatu properti pada suatu waktu, tempat dan keadaan atau kondisi pasar tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian nilai menurut Eckert (1990: 151-180 ) yang menyebutkan bahwa nilai merupakan suatu waktu yang menggambarkan harga atau nilai uang dari properti, barang atau jasa bagi pembeli dan penjual.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa nilai tanah adalah ukuran kemampuan tanah untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu secara langsung memberikan keuntungan ekonomis.

Model teori permintaan tanah pertama kali dikembangkan Von Thunen (1826) merupakan suatu model sewa tanah pada sektor pertanian yang menyatakan bahwa ada sebuah tempat sentral (kota) dengan dikelilingi oleh dataran luas, di mana kebutuhan makanan untuk kota tersebut disediakan oleh daerah-daerah sekitarnya.

Segala aktivitas manusia memerlukan ruang sekalipun harus dibayar mahal. Kebutuhan ruang yang berada di atas tanah tersebut menjadi kebutuhan dasar sehingga tanah menjadi komoditas ekonomi yang dapat dipertukarkan melalui mekanisme tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tanah mempunyai nilai.

Di dalam jurnal American Institute Of Real Estate Appraisers (Wolcott, 1987:22-63), mengemukakan empat factor yang dapat mempengaruhi nilai harta tanah dan bangunan antara lain : 1) Faktor ekonomi, ditunjukkan dengan hubungan permintaan dan penawaran dengan kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Variabel permintaan meliputi tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan daya beli, tingkat suku bunga dan biaya transaksi. Variabel penawaran meliputi jumlah tanah yang tersedia, biaya perijinan pajak dan biaya overhead lainnya. 2) Faktor sosial, ditunjukkan dengan karakteristik penduduk yang meliputi jumlah penduduk, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan dan lain-lain. Faktor ini membentuk pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. 3) Faktor pemerintah, seperti halnya berkaitan dengan ketentuan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah bidang pengembangan atau penggunaan tanah (zoning). Penyediaan fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah mempengaruhi pola penggunaan lahan, misalnya fasilitas keamanan, kesehatan, pendidikan, jaringan transportasi, peraturan perpajakan dan lain-lain. 4) Faktor fisik antara lain kondisi lingkungan tata letak atau lokasi dan ketersediaan fasilitas sosial.

Menurut Abd. Rahman M.Noor (1977:125): Penilaian adalah suatu penaksiran dan pendapat atas nilai dari suatu harta tanah/kekayaan oleh seorang penilai yang didasari intepretasi dari factor-faktor dan keyakinan pada waktu atau tanggal tertentu. Sedangkan Wolcott ( 1987: 22-63) mengemukakan bahwa konsep nilai ditimbulkan karena adanya faktor-faktor ekonomi.

## **2.5. Status Petani**

Hubungan petani dengan lahan terutama lahan pertanian mencakup kepemilikan dan penguasaan lahan. Kedua aspek yang berhubungan tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi pertanian dan tingkat pendapatan mereka. Rahardjo (1999) kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan pola kepemilikan dan penguasaan lahan, petani dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan yakni :

1. Petani pemilik-penggarap-murni, yaitu petani yang hanya menggarap lahan miliknya sendiri
2. Petani penyewa dan penyakap murni, yaitu petani yang tidak memiliki lahan tetapi menguasai lahan garapan melalui sewa atau bagi hasil
3. Petani pemilik-penyewa dan atau pemilik-penyakap, yaitu petani yang menggarap lahan sendiri dan juga lahan milik orang lain melalui persewaan atau bagi hasil
4. Petani-bukan penggarap, yaitu lahan miliknya disewakan atau disakapkan kepada orang lain (penyakap, penggarap atau buruh tani)

5. Petani tunakisma atau buruh tani yaitu petani yang mengerjakan lahan milik orang lain dengan mendapat upah dengan digaji.

Perbedaan golongan di atas semakin jelas menggambarkan kondisi pertanian di Negara berkembang, khususnya Indonesia yang telah menyerap sistem kapitalisme modern dimana sistem ini yang lebih mendominasi dalam proses modernisasi secara global. Beberapa fenomena yang terjadi adalah semakin banyaknya buruh tani, semakin banyaknya transaksi persewaan dibandingkan transaksi penyakapan dan juga semakin terkonsentrasinya pemilikan atau penguasaan lahan pada sekelompok orang atau pihak tertentu.

## **2.6. Pola Kerja Petani ( Alokasi Waktu dan Tenaga Kerja )**

Salah satu nilai budaya yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah kemampuan memanfaatkan waktu dengan baik, karena waktu merupakan salah satu sumber daya non fisik. Menurut Soerjani ( 1986:2) sumber daya alam fisik terdiri atas waktu, keanekaan dan hasil karya manusia (kebudayaan) seperti filsafat, ilmu pengetahuan, kesenian dan informasi.

Begitu pula persepsi terhadap waktu dapat dilakukan perubahan dengan memberikan penyuluhan terpadu, teratur dan berkesinambungan. Sejalan dengan perubahan persepsi terhadap waktu atau curahan waktu untuk berbagai aktifitas kehidupan. Perubahan alokasi waktu ini akan berpengaruh terhadap pola alokasi waktu masyarakat secara keseluruhan ( Anonim, 2011).

Di desa waktu kerja lebih rendah dari 6,0 jam sehari, bila dihitung merata sepanjang tahun. Menurut hasil penelitian White (1976) dalam Halide (1979) di pedesaan Jawa diperkirakan bahwa petani tidak bekerja selama 200 hari dalam setahun, sehingga waktu kerja rata-rata adalah 3,3 jam sehari. Sebagai bahan perbandingan, menurut keputusan Presiden RI nomor 58 Tahun 1964 tanggal 26 Maret 1964, waktu kerja resmi adalah 37,5 jam seminggu bagi pegawai kantor pemerintah, sedangkan untuk perusahaan perdagangan, bank dan swasta waktu kerja tersebut sekitar 39 jam seminggu. Hal ini berarti jam kerja berada antara 6,0 sampai 6,5 jam sehari. Namun menurut Instruksi Nomor 1 direktur Pembinaan Norma-Norma Perlindungan Tenaga Kerja tahun 1970, ditegaskan bahwa waktu kerja adalah lima hari dalam seminggu dan setiap hari sebanyak delapan jam. Atas dasar itu, jam kerja baku pada saat sekarang ini adalah delapan jam sehari.

Kriteria King (1976, halaman 2-3) dalam Halide (1979) mengemukakan bahwa rumahtangga petani (suami dan isteri) mengalokasikan waktu mereka masing-masing ke dalam tiga kelompok kegiatan, yaitu : a) *Market production time ( M1)* yaitu waktu yang digunakan untuk mencari nafkah ( *Income eaming market production* ) yang memungkinkan rumahtangga dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya di pasar. b) *Home production time (H1)* yaitu waktu yang digunakan untuk non-*Income eaming*, bekerja di rumah, untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak perlu dibeli di pasar. c) *Time Consuming (Tpr)*

yaitu waktu yang digunakan atau dinikmati, baik untuk kebutuhan fisiologi ( physiological needs) maupun untuk kebutuhan rekreasi. Sisa waktu, yaitu 24 jam dikurangi waktu yang dinikmati (Tpr), waktu mencari nafkah (M1) dan waktu kerja di rumah.

Kegiatan dan waktu yang dapat dimasukkan ke dalam *market production time ( M1)* adalah : 1) Kegiatan dan waktu yang dipakai untuk mencari nafkah teratur seperti sebagai pegawai, memburuh, buruhtani, penggarap, pegandeng, dan bertukang. 2) Jualan dan berdagang, termasuk waktu yang dipakai untuk membeli barang ke pasar, atau membawa/menjual barang ke pasar atau ke tempat konsumen, melihat-lihat situasi, mengikuti kursus dagang, dan lain-lain yang berkenan dengan kegiatan dagang. 3) Bekerja di sawah seperti penyiapan tanah, menabur, menyediakan benih menanam, menyang, memupuk, memperbaiki pematang, mengatur air, membeli input lain, mencari kredit dan lain-lain pekerjaan sebelum panen; pekerjaan sewaktu panen seperti memetik panen, mengikat, mengeringkan, menyimpan, menumbuk, menggiling dan membakar jerami di sawah. 4) Menyiapkan, menanam dan memelihara tanah kebun dan pekarangan. 5) Memelihara dan memberikan makan ternak. 6) Usaha-usaha seperti kerajinan rumah yang menghasilkan barang yang dapat dijual untuk mendapatkan uang tunai atau semacamnya yang membawa keuntungan. Termasuk di dalamnya tukang batu, memintal, menjahit, menyediakan makanan, beternak, unggas, pandai besi memperbaiki alat-alat pertanian, membuat dan memperbaiki pagar, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh

dimasukan yang dikonsumsi oleh anggota rumahtangga. 7) Memasarkan hasil usaha dan kerajinan rumahtangga. 8) Waktu pergi dan pulang bekerja

Kegiatan dan waktu yang termasuk *home production time (H1)* adalah 1) membeli, menyiapkan, memasak dan menghidangkan makanan dan minuman. 2) Waktu makan dan minuman. 3) Mengasuh anak seperti member makan, memandikan, menggendong dan menidurkan anak 4) Bercengkrama dengan anak-anak 5) Berbelanja untuk keperluan rumah tangga. 6) Mencari, mengangkut kayu bakar, memperbaiki sumur atau alat pengangkut air. 7) Mencuci pakaian dan pecah belah, membersihkan/memperbaiki rumah/halaman/pagar, mengatur tempat tidur, dekorasi rumah tangga. 8) Bergotong royong.

Kegiatan waktu yang termasuk *time consuming (Tpr)* adalah 1) Kebutuhan Fisiologis (Physiological needs) termasuk waktu tidur, mandi, berpakaian, istirahat, bersembahyang, kunjungan sosial ( pegantin, kematian, sunatan/kenduru lainnya, orang sakit/bersalin. 2) Waktu rekreasi termasuk rekreasi pasif, rekreasi yang tidak banyak membutuhkan usaha dan energy fisik seperti nonton bioskop/TV, pertandingan, mendengarkan radio/musik, membaca buku/majalah/Koran.

## **2.7. Produksi**

Produksi adalah proses perubahan barang-barang dan jasa yang mempunyai nilai yang disebut input dan penghasilan barang-barang dan jasa-jasa yang mempunyai nilai yang disebut output. Produksi dalam

pengertian teknis merupakan suatu proses pendayagunaan sumber-sumber yang tersedia dengan mengharapkan terwujudnya hasil yang lebih korbanan yang telah diberikan. Dari pengertian ekonomi, produksi merupakan proses pendayagunaan segala sumber yang tersedia tercermin kualitas dan kuantitas, terkelola dengan baik sehingga komoditas dapat dipasarkan (Kartasapoetra, 1988 dalam Musliaty, 1997).

Menurut Mubyarto (1989), dalam Ilmu Ekonomi dikatakan bahwa petani membandingkan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan, revenue) dengan biaya (korbanan, cost) yang harus dikeluarkan. Hasil yang diperoleh petani pada saat panen disebut produksi dan biaya yang dikeluarkan disebut biaya produksi. Usahatani yang produktif berarti usahatani itu berproduktivitas tinggi. Efisiensi fisik ini mengukur banyaknya hasil produksi (output) yang dapat diperoleh dari satu kesatuan input.

Produksi merupakan suatu proses penggunaan unsur-unsur produksi dengan maksud untuk menciptakan faedah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan defenisi tersebut dapat dikemukakan bahwa produksi akan sangat ditentukan oleh adanya kombinasi dari empat unsur produksi yaitu : alam/tanah, modal, tenaga kerja, dan pengelolaan/pengolahan. Alam dan tenaga kerja dipandang sebagai unsur ahli dalam proses produksi sedangkan modal dan pengelolaan merupakan suatu unsur dari pengorganisasian unsur-unsur alam, tenaga kerja, dan modal serta pengelolaan itu sendiri (Djojohadikusumo, 1990).

Produk merupakan suatu hasil akhir dari suatu proses produksi. Produk atau produksi dalam bidang pertanian atau lainnya dapat bervariasi yang antara lain dapat disebabkan adanya perbedaan kualitas. Kualitas yang baik dihasilkan oleh suatu proses produksi yang baik jika dilaksanakan dengan baik dan begitu pula sebaliknya, produksi menjadi kurang baik bila usahatani tersebut dilaksanakan dengan kurang baik. Soekartawi (1993) menjelaskan secara spesifik bahwa besar kecilnya produksi pertanian dipengaruhi langsung oleh penggunaan serta kombinasi faktor-faktor produksi.

Dalam kegiatan produksi, terdapat faktor-faktor produksi yang ikut mempengaruhi keberhasilan usahatani. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu faktor-faktor yang perbaikannya dapat dijangkau oleh manusia atau petani seperti lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan aspek manajemen. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang sulit dikontrol dan berada di luar jangkauan kemampuan petani seperti iklim, perubahan harga, kebijaksanaan pemerintah dan lembaga instansi yang memberikan bantuan (Soekartawi, dkk, 1986).

Adapun faktor-faktor produksi terdiri dari empat komponen, yaitu :

### 1. Lahan

Lahan mempunyai hubungan erat dengan pertanian, yaitu sebagai media atau tempat tanaman dapat hidup. Pada sektor pertanian, faktor produksi lahan mempunyai peranan yang sangat penting. Luas lahan dimiliki petani dalam berusaha tani berpengaruh terhadap pendapatan petani. apabila lahan yang dimiliki mampu dikelola dengan baik maka akan memberi keuntungan bagi petani.

### 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja berperan dalam proses produksi mulai dari sebelum tanam sampai pengolahan hasil. Dalam setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada tingkat tertentu.

### 3. Modal

Umumnya modal diartikan sebagai barang-barang bernilai ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau meningkatkan produksi. Modal berhubungan erat dengan uang. Pada kegiatan produksi, ketersediaan modal dapat menunjang jalannya proses produksi yakni pemenuhan kebutuhan (input) dalam pengelolaan usahatani. Pada usahatani padi modal digunakan untuk membeli bibit, pupuk (pupuk an organik dan pupuk organik), serta kebutuhan lainnya dalam proses produksi. dalam pelaksanaan pencetakan sawah baru pupuk yang digunakan

terdiri atas pupuk organik berupa pupuk kompos dan pupuk an organik seperti Urea (N) dan NPK (Ponska)

#### 4. Skill atau Manajemen (Pengelolaan)

Manajemen atau pengelolaan, keberadaannya tidak menyebabkan proses produksi batal. Karena timbulnya manajemen sebagai faktor produksi lebih ditekankan pada usahatani yang maju dan berorientasi pasar dan keuntungan. Usahatani di Indonesia sekarang menurut pemerhati usaha pertanian sebagian ada yang berorientasi pasar dengan target keuntungan (market oriented) dan sebagian masih berpikir untuk kepentingan memenuhi kebutuhan sendiri (subsistence).

Selanjutnya Rahim dan Hastuti (2007) mengemukakan bahwa proses produksi /budidaya komoditi pertanian merupakan proses usaha bercocok tanam dilahan untuk menghasilkan material. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam budidaya tanaman padi antara lain persiapan lahan, persemaian, penanaman, perawatan tanaman, sampai dengan panen.

Petani sebagai pelaksana kegiatan pencetakan sawah baru mengharapkan produksi yang lebih besar agar memperoleh pendapatan yang lebih besar pula. Untuk itu petani menggunakan input meliputi: tenaga kerja, modal dan sarana produksi sebagai umpan untuk mendapatkan produksi yang diharapkan. Ada kalanya produksi yang diperoleh justru lebih kecil dan sebaliknya ada kalanya produksi yang diperoleh lebih besar. Dari data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu pelaksanaan program pencetakan sawah baru dimulai sejak tahun 2008

dengan luasan areal 200 Ha, tahun 2009 seluas 200 Ha, tahun 2010 seluas 250 Ha, tahun 2011 600 Ha, tahun 2012 seluas 1.500 Ha dan tahun 2013 yang sedang berjalan seluas 700 Ha. (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu, 2013)

Kegiatan pencetakan sawah baru di wilayah kabupaten Luwu baru dimulai pada tahun 2008. kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Luwu dan petani dan bertujuan meningkatkan produksi dan peningkatan luas tanam. Dalam kurun waktu 5 tahun itu telah dilakukan pencetakan sawah baru seluas 2.750 Ha dengan rata – rata produksi 3 – 4 ton/per Ha

## **2.8. Pendapatan**

Salah tujuan petani dalam melaksanakan usahataniya adalah memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Pendapatan dalam pengertian umum adalah hasil produksi yang diperoleh dalam bentuk materi dan dapat kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana produksi. Pendapatan ini umumnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau dapat pula dikatakan bahwa pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha selama satu periode (Hadi dan Lincoln, 1987 dalam Rafika, 2010).

Pendapatan adalah keuntungan atau hasil bersih yang diperoleh petani dari hasil produksinya. Seorang petani dapat memperoleh keuntungan yang maksimum asalkan petani melakukan tindakan dengan cara meningkatkan hasilnya dengan menekan harga petani melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga yang bersamaan (Daniel, 2004 dalam Rafika, 2010).

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan usahatani dapat terbagi dua pengertian yaitu antara lain pendapatan kotor (*gross farm income*) dan pendapatan bersih (*net farm income*).

a. Pendapatan Kotor

Pendapatan kotor (*Gross Farm Income*) merupakan pendapatan yang diterima petani dari hasil penjualan produk tanpa adanya pengurangan dengan biaya produksi. Persamaannya :

$$TR = Y \cdot P_y$$

Dimana : TR = Pendapatan kotor (Rp/ha)

Y = Total produksi (kg/ha)

P<sub>y</sub> = Harga produksi (Rp/kg)

b. Pendapatan bersih

Pendapatan bersih (*Net Farm Income*) adalah pendapatan yang diterima petani setelah adanya pengurangan dengan biaya produksi.

Persamaannya yaitu :

$$\pi = TR - TC$$

Dimana :  $\pi$  = Pendapatan (Rp/ha)

TR = Total penerimaan (Rp/ha)

TC = Total pengeluaran (Rp/ha)

Analisis pendapatan usahatani memerlukan dua keterangan pokok, yaitu keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran selama jangka waktu yang ditetapkan. Penerimaan usahatani berwujud tiga hal, yaitu hasil penjualan dari suatu produk, produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarganya selama melakukan kegiatan, dan kenaikan nilai inventaris. Pengeluaran usahatani meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan besarnya produksi. Selain biaya tetap dan biaya variabel, pengeluaran juga mencakup nilai inventaris usahatani yang disebabkan karena hilang, rusak, atau penyusutan (Soeharjo dan Patong, 1978).

Penggunaan teknologi baru atau adopsi teknologi baru pada pertanian akan berpengaruh terhadap biaya, demikian pula tentunya terhadap penerimaan produsen. Bentuk-bentuk teknologi tersebut dapat berupa cara budidaya yang lebih baik, introduksi teknologi kimia seperti pupuk dan obat-obatan, introduksi teknologi biologis seperti bibit unggul, dan teknologi mekanis meliputi penggunaan alat-alat pertanian yang dapat meringankan tenaga kerja (Hernanto, 1991).

Pendapatan usahatani akan dipengaruhi oleh produksi dan biaya usahatani. Usaha untuk mencapai tingkat pendapatan yang tertinggi, petani mempunyai pilihan dalam mengkombinasikan banyak faktor. Faktor tersebut antara lain penguasaan sumberdaya lahan (jenis lahan, luas lahan, kesuburan, dan lokasi), kemudahan mendapat tenaga kerja,

kemudahan memperoleh modal usaha dan sarana produksi dan kemudahan memasarkan hasil produksi dengan harga wajar (Kasryono, 1986 dalam Musliaty, 1997).

Pendapatan yang diterima oleh petani dalam satu tahun berbeda dengan pendapatan diterima petani lainnya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yang masih bisa diubah dalam batas kemampuan petani adalah luas usahatani, efisiensi kerja, dan efisiensi produksi. Sedangkan faktor yang tidak bisa diubah, yaitu iklim dan jenis tanah (Soeharjo dan Patong, 1978)

Masalah pendidikan, pengetahuan dan keterampilan ini erat kaitannya dengan tingkat produksi dan pendapatan yang dicapai oleh petani. Kekurangan pengetahuan dan keterampilan menyebabkan petani tidak mengetahui cara pembudidayaan yang benar dengan menggunakan berbagai input yang tepat dan tidak akan mampu menerapkan teknologi dan sekaligus akan membatasi gerak inovatif.

## **2.9. Usahatani Padi**

Menurut Affandi ( 1977) tanaman Padi termasuk golongan tanaman setahun atau semusim. Bentuk batangnya bulat dan berongga, daunnya memanjang seperti pita yang terdiri pada ruas-ruas batang dan mempunyai sebuah malai yang terdapat pada ujung batang.

Bagian-bagian tanaman dalam garis besarnya dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu: bagian vegetatif, yang meliputi: akar, batang dan

daun dan bagian generatif, yang meliputi: malai yang terdiri bulir-bulir daun dan bunga.

Tumbuhan padi (*Oryza sativa* L) termasuk golongan tumbuhan Gramineae, yang mana ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Tumbuhan padi bersifat merumpun, artinya tanaman-tanamannya anak-beranak. Bibit yang hanya sebatang saja ditanamkan dalam waktu yang sangat singkat telah membentuk satu dapuran, dimana terdapat 20-30 atau lebih anakan/tunas-tunas baru (Siregar, 1980).

Teknologi budidaya padi secara tradisional petani yang selama ini diterapkan petani di lahan sawah irigasi sangat sederhana sekali, yaitu benih yang digunakan sebagian petani untuk bibit adalah benih yang berasal dari tanaman padi tahun sebelumnya tanpa melakukan persemaian. Namun menggunakan varietas unggul. Pemupukan yang dilaksanakan tidak berimbang, yaitu hanya diberi pupuk N dan P saja, sedangkan pupuk K umumnya tidak diberikan, karena harga pupuk K cukup mahal dan petani belum memahami bahwa dengan pemupukan berimbang akan dapat meningkatkan hasil padi. Pemberian pupuk organik juga tidak dilakukan.

Pemeliharaan tanaman dalam hal ini pengendalian gulma dilakukan menggunakan racun. Sedangkan pengendalian hama dan penyakit dilakukan kalau ada serangan. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan insektisida sesuai anjuran.

Panen di lakukan pada saat tanaman padi sudah umur telah cukup. Cara memanen dengan alat sabit dan mesin. kemudian padi dirontokan dengan alat perontok yang namanya threaser (Khairuddin, 2002).

## **2.10. Dinamika Sosial Ekonomi Petani – Kakao**

Dinamika menurut Purwandari ( 2006 ) adalah sesuatu yang selalu bergerak dan berkembang serta mampu menyesuaikan diri secara memadai terhadap suatu keadaan atau kondisi. Dinamika sosial ekonomi petani pedesaan di Indonesia, sama halnya dengan yang terjadi di Negara-negara berkembang lainnya, sangatlah erat hubungan dan kaitannya dengan dinamika perekonomian makro nasional secara keseluruhan. Sebagai suatu Negara yang sedang berkembang, maka peranan sektor pertanian di Indonesia, walaupun masih besar, akan mengalami kecenderungan yang makin menurun di tahun-tahun yang akan datang. Namun demikian, sektor pertanian di Indonesia, senantiasa mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah, karena sektor tersebut adalah pemasok utama kebutuhan pangan nasional, dan sebagian besar penduduk masih berada di sektor ini. Kebutuhan perindustrian sangat tergantung terhadap bahan baku mentah dari pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian menjadi penting karena pembangunan ekonomi akan mengalami kesulitan dan stagnasi apabila tidak ditunjang oleh pembangunan pertanian itu sendiri. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan nasional sebagai akibat keberhasilan

pembangunan industri akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap komoditas pertanian. Kalau produksi pertanian tidak meningkat, maka impor akan melonjak, dengan akibat timbulnya masalah neraca pembayaran ( Rusastra, 1997 ).

Dalam tataran domestik, pembangunan pertanian Indonesia dihadapkan pada berbagai perubahan kondisi sosial ekonomi petani dan usaha pertanian di Indonesia. Beberapa perubahan yang juga menjadi permasalahan dalam pembangunan pertanian di Indonesia diantaranya (1) Makin kecilnya perusahaan dan penguasaan lahan pertanian per keluarga petani disebabkan terjadinya fragmentasi dan tingginya laju alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian, (2) Tenaga kerja pertanian didominasi oleh tenaga kerja usia tua serta tidak tertariknya tenaga kerja muda untuk bekerja di sektor pertanian, (3) Ada kecenderungan menurunnya penggunaan berbagai input produksi (pupuk dan pestisida) disebabkan daya beli dan nilai tukar petani yang makin menurun, dan (4) Produktivitas tenaga kerja pertanian relative rendah dibanding sektor non pertanian mengakibatkan pendapatan rumah tangga petani yang rendah. Berbagai permasalahan tersebut secara simultan menyebabkan kondisi petani Indonesia yang secara ekonomi kurang beruntung. Sehingga jumlah penduduk miskin terbanyak pada daerah pedesaan.

Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian di Indonesia seperti telah diuraikan di atas, ke depan dituntut perlunya perubahan strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang

mampu memecahkan permasalahan tersebut. Secara umum strategi pembangunan yang perlu dikembangkan adalah pendekatan yang mengedepankan kepentingan penduduk miskin termasuk di dalamnya rumah tangga petani. Dalam kaitan tersebut, pola pemberdayaan petani dengan pendekatan partisipatif untuk menangkap kebutuhan petani sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang ada merupakan pendekatan pembangunan pertanian dan pedesaan yang diduga akan terlanjutkan ( sustainable). Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas sumberdaya lahan melalui penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat menjamin kapasitas produksi sesuai dengan kaidah konservasi dan ramah lingkungan. Reforma agrarian yang telah lama dijadikan wacana perlu dipertimbangkan implementasinya, dalam kerangka meningkatkan skala usahatani yang optimum dalam usaha produksi pertanian. Selain itu, untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta memperlancar arus distribusi produk maupun input produksi, pengembangan sarana dan prasarana dan infrastruktur pertanian ( sarana irigasi, jalan, pasar, sarana telekomunikasi ) menjadi prasyarat pelancar pembangunan pertanian dan pedesaan. Hal penting lain yang diharapkan dapat memicu peningkatan produksi dan produktivitas pertanian adalah pengembangan dan pemasyarakatan system inovasi teknologi pertanian.

Salah satu produk pertanian yang menjadi perhatian pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan untuk dikembangkan saat ini adalah

tanaman kakao. Kakao merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan dunia dalam membuat coklat. Oleh karena itu tidak heran kalau pemerintah menggalakan pengembangan tanaman kakao untuk mendapatkan produksi yang tinggi.

Kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan sekaligus komoditai ekspor non-migas yang memiliki prospek cerah sebab permintaan di dalam negeri juga semakin kuat dengan berkembangnya sektor agroindustri. Kebutuhan kakao diseluruh dunia diperkirakan dapat menyerap seluruh produksi kakao dunia. Pengaruh guncangan harga kakao sangat kecil, sebab permintaan kakao dunia semakin meningkat. Diperhitungkan bahwa prospek pasaran kakao dunia akan tetap baik dan diperkirakan harga kakao di pasaran dunia akan dapat bertahan pada taraf yang cukup tinggi untuk tahun –tahun mendatang ( Sunanto, 1992 )

Namun uniknya, ketika dunia membutuhkan produksi kakao dalam jumlah besar, pada daerah penelitian malah terjadi penebangan pohon kakao dikalangan petani. Para petani menebang lahan kakao mereka untuk ditanamai tanaman lain. Alasan petani yang umum adalah terdesak oleh kebutuhan hidup yang dari hari ke hari semakin meningkat. Alasan lain yaitu tanaman kakao terserang oleh hama dan penyakit yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh petani . Petani melakukan penebangan lahan kakao secara besar-besaran karena produksi kakaonya telah merosot dan bahkan tidak berproduksi lagi. Tekanan ekonomi pada saat seperti inilah

menyebabkan banyak petani melakukan pengalihfungsian lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tanaman kakao pada daerah penelitian rata-rata telah berumur di atas 18 tahun sehingga berpengaruh terhadap tingkat produksinya, apalagi tanaman kakao ini diserang hama penggerak batang dan buah yang membatu. Petani kesulitan dalam pengendalian hama tersebut sehingga mereka melakukan penebangan tanaman kakao, sejalan dengan pendapat Spillane ( 1995) pohon kakao mencapai tingkat produksi yang matang sesudah enam atau tujuh tahun, dan mulai berbuah sesudah tiga tahun. Ada banyak varietas hibrida yang berbuah dan mencapai tingkat kematangan lebih cepat dibandingkan dengan varietas tradisional. Pohon terus menerus berbuah selama beberapa tahun, kadang-kadang sebanyak 50 -60 tahun, tetapi pada umumnya hasil mulai turun sesudah pohon berusia setelah melewati 15 tahun atau lebih awal lagi kalau pohon tidak terpelihara dengan baik atau mengalami penyakit yang serius.

## **2.11. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pencetakan Sawah Baru**

### **1. Survei dan Investigasi**

- a. Survei dan dilakukan 1 (satu) tahun sebelum DIPA untuk kegiatan perluasan sawah dikeluarkan. Sehingga untuk mendapatkan penganggaran perluasan sawah pada tahun 2010, proses survey dan investigasi telah dilakukan pada tahun 2009
- b. Survei/Investigasi calon lokasi ialah kegiatan penelitian pada calon lokasi perluasan sawah baik pada daerah irigasi, lahan rawa maupun tadah hujan yang bertujuan untuk memperoleh calon lokasi yang layak untuk sawah
- c. Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu :
  1. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan
  2. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
  3. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi
  4. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah Negara yang diijinkan untuk di garap oleh petani
  5. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa)

6. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan lain
7. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk sawah
8. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.

**2. Tahapan Survei/Investigasi sebagai berikut :**

- a. Persiapan berupa penggandaan peta situasi, peta rancangan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, bahan, peralatan, pembuatan daftar pertanyaan dan table-tabel untuk pelaksanaan maupun pengolahan data. Selain itu dipersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dilapangan.
- b. Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap rencana persiapan pelaksanaan kegiatan perluasan lahan sawah pada calon lokasi yang akan dikembangkan . Koordinasi terutama dilakukan dengan Bappeda untuk kepastian RTRW, Dinas kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasan status kepemilikan dan Dinas Pengairan untuk koordinasi system jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan.
- c. Pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa parameter dan karakteristik lahan yang akan digunakan sebagai acuan penentuan criteria kesesuaian lahan, debit air, sifat fisik tanah, kedalaman gambut, nilai ekonomis vegetasi, kesediaan petani, daftar nama petani dan luas lahan, pengukuran dan pemetaan lokasi. Data

sekunder berupa pola usahatani, analisis usahatani, penyediaan saprotan, pemasaran hasil, luasan lahan padi sawah di lokasi dan curah hujan baik harian atau bulanan selama satu tahun

d. Tabulasi dan pengolahan data hasil survey

Data hasil survey ditabulasi dan diolah untuk pembuatan laporan hasil survey yang bertujuan untuk menentukan kelayakan calon lokasi dan pembuatan desain

e. Pembuatan laporan kegiatan survei sebagai dasar penetapan lahan sawah yang akan dikonstruksikan

Hasil survey calon lokasi perluasan sawah nantinya berupa buku laporan dan daftar lokasi petak tersier yang dinyatakan layak untuk didesain yang selanjutnya dicetak menjadi sawah dan daftar lokasi yang tidak layak untuk didesain.

### **3. Penetapan Lokasi Perluasan Sawah**

Penetapan lokasi dilakukan 1 (satu) tahun sebelum DIPA untuk kegiatan perluasan sawah dikeluarkan. Sehingga untuk mendapatkan penganggaran perluasan sawah pada tahun 2010 penetapan lokasi telah dilakukan pada tahun 2009. Penetapan lokasi perluasan sawah ditanda tangani oleh Bupati/Walikota bertujuan untuk memperoleh jaminan bahwa sawah yang baru dicetak tidak dialihkan untuk peruntukan lainnya, sehingga investasi yang cukup besar untuk perluasan sawah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika menurut

hasil survey dan Investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung oleh dokumen berikut :

1. Rekomendasi kesesuaian lahan untuk perluasan sawah (irigasi/tadah hujan/rawa/lebak) sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku
2. Data calon petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal
3. Peta-peta yang terkait lokasi yang akan dikerjakan yang terdiri dari :
  - a. Peta situasi lokasi
  - b. Peta topografi
  - c. Peta Vegetasi
  - d. Peta desain sawah

#### **4. Konstruksi Perluasan Sawah**

Dalam pelaksanaan konstruksi diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

##### **1. Persiapan Petani**

Persiapan petani diperlukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan konstruksi perluasan areal sawah, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut :

##### **a. Sosialisasi Kepada Petani**

Sosialisasi kepada petani peserta perluasan sawah dilakukan untuk memberikan pengertian terhadap kegiatan perluasan sawah, tata cara dan pentahapan pelaksanaan kegiatan konstruksi perluasan areal sawah serta pemanfaatan lahan sawah baru yang nantinya

dilaksanakan oleh petani sendiri. Dengan demikian diharapkan petani dapat lebih berpartisipasi didalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan pemanfaatannya. Sosialisasi kepada petani ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten atau PPL

b. Pendaftaran Ulang Petani

Mengingat adanya tenggang waktu antara pelaksanaan desain dengan pelaksanaan konstruksi yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan terhadap status kepemilikan tanah dan vegetasi lahan pada calon lokasi perluasan sawah, maka masih diperlukan pendaftaran ulang petani peserta. Dengan pendaftaran ulang ini akan diperoleh kepastian nama-nama petani dan status kepemilikan tanah serta jenis vegetasinya. Pendaftaran ulang ini dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan dibantu oleh PPL.

c. Pengajuan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan Petani.

Petani mengajukan Surat Permohonan dan Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan perluasan sawah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani kegiatan perluasan sawah. Petani yang diperkenankan mengajukan surat Permohonan hanyalah petani pemilik penggarap/penggarap yang berdomisili di dalam desa atau daerah kecamatan dari lokasi dengan mata pencaharian utamanya usahatani. Surat ini dibuat untuk masing-masing petani dengan data-data lokasi, foto copy keterangan identitas, pernyataan permohonan dan kesanggupan serta tanda tangan petani yang bersangkutan.

## 2. Persiapan Administrasi

Kegiatan konstruksi perluasan sawah pada tahun 2010 dilakukan dengan pola pelaksanaan transfer uang ke rekening kelompok dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan dana bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Hal penting dalam penggunaan MAK Bantuan Sosial dengan pola transfer uang ini adalah Pembuatan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Dalam pembuatan RUKK harus sudah memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan pencetakan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan pencetakan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan pencetakan sawah TA.2010. Merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan). Seandainya dari perhitungan RUKK petani, yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator lapangan dengan mendasarkan pada hasil Desain, Anggaran yang disiapkan dalam DIPA kurang untuk kegiatan perluasan areal sawah, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab kelompok dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya untuk pekerjaan yang diluar kemampuan petani, maka kelompok berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya.

### 3. Persiapan Lapangan

#### a. Penyediaan direksi kit/Saung Tani

Tujuan pembuatan direksi kit atau tempat lainnya yang sejenis dilokasi adalah untuk tempat persiapan dan penyimpanan peralatan dalam menunjang kelancaran kegiatan di lapangan

#### b. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Koordinator Lapang/Tim dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten bersama camat, Kepala Desa dan Petani Pemilik Penggarap/Penggarap dengan berpedoman pada Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) dan desain perluasan sawah guna mencocokkan dengan keadaan sesungguhnya di Lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan lokasi antara lain:

1. Batas-batas areal lokasi yang akan dikerjakan
2. Batas-batas dan luas pemilikan lahan yang akan dikerjakan
3. Nama-nama petani dan keadaan vegetasi

#### c. Pemasangan patok-patok batas pemilikan

Dalam pemasangan patok-patok dilakukan oleh

3. Pemasangan patok batas pemilikan dilakukan oleh Petani sendiri dengan disaksikan oleh petugas Dinas Pertanian Kabupaten, Camat dan Petani Pemilik Penggarap/Penggarap serta Kepala Desa. Apabila patok-patok batas kepemilikan lahan hilang, maka harus

dipasang patok-patok baru batas pemilikan lahan tersebut oleh petani yang bersangkutan.

4. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, maka patok-patok tersebut dipasang kembali dengan disaksikan oleh petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Petani
  5. Lokasi yang telah selesai dikonstruksi diperiksa dan diukur ulang oleh Koordinator lapang/Tim Teknis bersama petani untuk mendapatkan gambaran yang pasti terhadap luasannya.
- d. Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah
- a. Pekerjaan konstruksi perluasan sawah pada daerah irigasi dan tadah hujan

Ketentuan-ketentuan pekerjaan konstruksi perluasan sawah sebagai berikut

:

1. Konstruksi perluasan sawah terdiri dari land clearing dan land leveling, pembuatan pematang batas pemilikan, pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani, pembuatan pintu-pintu bagi tersier dan pembuatan jalan usahatani serta prasarana lain yang bersifat pelayanan umum
2. Pelaksanaan konstruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, sungai, areal pompa air, saluran yang sudah ada dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan konstruksi atau

pekerjaan konstruksi/prasarana lain, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab kelompok

3. Pekerjaan konstruksi perluasan sawah harus dilaksanakan dalam satu hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatani
4. Pembangunan prasarana lain yang menunjang kegiatan perluasan sawah dapat dilaksanakan apabila kegiatan tersebut bersifat mendesak ( betul-betul diperlukan) menyangkut kepentingan umum seperti pembuatan talang, gorong-gorong dan lain – lain
5. Pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah dapat melibatkan petani diluar wilayah tersebut sejauh jumlah tenaga kerja yang ada masih kurang dengan mendasarkan kepada kesepakatan bersama kelompok tersebut ( musyawarah kelompok)
  - a. Kegiatan land clearing antara lain dapat dirinci sebagai berikut : Pembabatan/Penebasan semak belukar  
Tujuan dilakukannya pembabatan/penebasan semak belukar termasuk pohon-pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1 m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.

b. Penebangan/Penumbangan pohon-pohonan.

Penebangan/Penumbangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dengan masih menyisakan tunggul. Sedangkan pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm adapat dilakukan dengan penumbangan atau perobohan

c. Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya. Sisa-sisa pemotongan/perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau masyarakat sekitarnya.

d. Pencabutan tunggul dan akar-akarnya

Tunggul pohon yang masih tersisa hasil penebangan harus dibongkar/dicabut sampai keakar-akarnya supaya nanti tidak merusak/mengganggu pelaksanaan konstruksi dan pengolahan sawah yang dicetak nantinya. Sedangkan untuk tunggul pohon yang berdiameter > 30 cm dengan kedalaman akar lebih dari satu meter dapat dibiarkan lapuk tanpa harus dicabut.

e. Pembersihan Lahan

Semua sisa-sisa hasil pembabatan pemotongan/perencenakan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkirkan dari lokasi yang akan dicetak

6. Kegiatan land leveling dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penggalian dan penimbunan tanah.

Dalam upaya mendapatkan lahan yang datar untuk memudahkan konstruksi perluasan sawah, maka lahan-lahan yang mengalami kemiringan harus dilakukan perataan dengan melakukan penggalian pada daerah yang lebih tinggi dan penimbunan pada daerah yang lebih tinggi dan penimbunan pada daerah yang lebih rendah dengan memperhatikan aspek kesuburan lahan ( hindari kerusakan aspek kesuburan lahan akibat penggalian dan penimbunan)

b. Perataan tanah

Untuk memperoleh lahan yang datar, maka setelah dilakukan penggalian dan penimbunan dilakukan perataan dan pemadatan sederhana terutama pada bagian timbunan. Sederhana terutama pada bagian timbunan.

Perataan tanah dilakukan sesuai dengan kemiringan yang diperbolehkan dan lahan tersebut sudah siap untuk dicetak

c. Pemadatan lereng talud teras untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak, maka pada lereng talud teras dilakukan pemadatan

d. Pembuatan jalan usahatani (JUT)

Pembuatan jalan usahatani pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk memudahkan pengangkutan saprodi, alat mesin dan hasil panen dari atau ke lokasi perluasan sawah.

e. Pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT).

Pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani dan pintu-pintu bagi tersier pada hamparan perluasan sawah bertujuan untuk menyalurkan air dari atau ke lokasi perluasan sawah untuk memenuhi kebutuhan air dalam pengelolaan sawah

f. Pembuatan pematang batas pemilikan

Untuk memudahkan penentu kepemilikan lahan antar petani, dibuat suatu pematang atau pembatas antar petak-petak sawah petani yang telah dicetak. Hal ini bertujuan agar jangan terjadinya kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan dan pengolahan lahan yang telah dicetak.

g. Penyiapan tanah siap tanam

Penyiapan tanah melalui pengolahan tanah dimaksudkan untuk memudahkan petani dapat menanam segera setelah sawah selesai dicetak, agar sawah tidak menyemak kembali.

b. Pekerjaan konstruksi perluasan sawah pada daerah rawa.

Ketentuan-ketentuan pekerjaan konstruksi perluasan sawah:

- a. Konstruksi perluasan sawah pada daerah rawa terdiri dari Land Clearing, Land Levelling, pembuatan pintu air klep sederhana, tanggul pengamanan dan pematang batas pemilikan lahan
- b. Konstruksi perluasan sawah di daerah rawa dapat berupa sistem surjan atau sistem lain tergantung pada kebutuhan/kemauan petani
- c. Pelaksanaan konstruksi tidak diperbolehkan merusak fasilitas lingkungan yang sudah ada misalnya, jalan desa, saluran pembuang dan lain sebagainya. Bila terjadi kerusakan sebagai akibat pelaksanaan konstruksi perluasan sawah, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab kelompok.
- d. Pekerjaan konstruksi perluasan sawah harus dilaksanakan dalam hamparan yang mengelompok, sehingga memudahkan dalam usahatani.
- e. Kegiatan land clearing antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pembabatan/penebasan semak belukar termasuk pohon-pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm dan tumbuhan strata bawah berketinggian 1m, untuk membuka area serta membuat ruang pandang pada pekerjaan berikutnya.

b. Penebangan/Penumbangan pohon-pohonan

Penebangan dilakukan terhadap pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dengan masih menyisakan tunggul. Sedangkan pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 30 cm dapat dilakukan dengan penumbangan atau perobohan.

c. Pemotongan/perencekan dan pengumpulan batang, cabang dan ranting

Untuk memudahkan pembersihan hasil penebangan, maka dilakukan pemotongan/perencekan pohon, cabang dan ranting-rantingnya. Sisa-sisa pemotongan/perencekan dikumpulkan pada suatu tempat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.

d. Pencabutan tunggul dan akar-akarnya

Tunggul pohon yang masih tersisa hasil penebangan harus dibongkar/dicabut sampai keakar-akarnya supaya nanti tidak merusak/mengganggu pelaksanaan

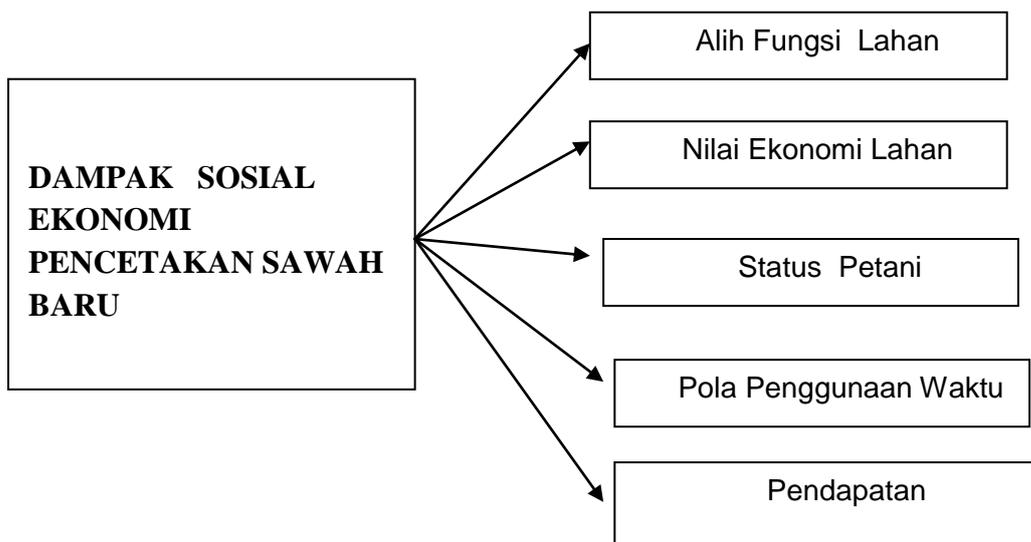
konstruksi dan pengolahan sawah yang dicetak nantinya. Sedangkan untuk tunggul pohon yang berdiameter > 30 cm dengan kedalaman akar lebih dari satu meter dapat dibiarkan lapuk tanpa harus dicabut.

e. Pembersihan lahan

Semua sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan/perencekan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi harus dibersihkan/disingkarkan dari lokasi yang akan dicetak.

## 2.12. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuatkan kerangka pikir



### **2.13. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tinjauan teoritis dapat ditarik hipotesis :

1. Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap alih fungsi lahan
2. Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap nilai ekonomi lahan
3. Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap status petani
4. Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap pola penggunaan waktu
5. Kegiatan pencetakan sawah baru memberikan dampak terhadap pendapatan